Society: Community Engagement and Sustainable Development
Vol 3 No 2
DOI https://doi.org/10.62515/society/
(ISSN : 3089-3992 and E-ISSN : 3089-3992)

Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi Digital untuk Penguatan Layanan Publik dan Administrasi Pendidikan di Desa Ciherang dalam Mendukung SDGs Desa

Neneng Fauziah Khodijah[1], Fikri Zauharul Firdaus[2], Ina Nurul Inayah[3], Ahmad Reza Pahlevi[4], Ivanka Kaniz Az Zahra[5]
[1,2,3,4,5]Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assa'idiyyah Cipanas
[1]Email: abahmamahrofiwidad@gmail.com
[2]Email: fikurizf@gmail.com
[3]Email: inazaky@gmail.com
[4]Email: rezapahlevi@gmail.com
[5]Email : ivankakaz@gmail.com

Article History:
Received: 20 Juli 2026
Revised: 20 Agustus 2026
Accepted: 30 September 2026

https://doi.org/10.62515/society.v3i2.1625

Keywords: *Digital Transformation, Reporting, Teaching Modules, Community Service, SDGs*

Abstract
This Community Partnership Program (PKM) activity is carried out within the context of a village possessing social, educational, and economic foundations but still has room for development in the use of digital technology. The main concern of this service activity is how the available assets can be linked to digital innovation so that public services, educational administration, learning, MSME marketing, and social participation become more structured. The activity aims to identify village development needs, strengthen public service communication through Lapordes, assist teacher administration through the RPP/Teaching Module application, support learning through Buniaga Edu-Assist and Education Park, and encourage MSME digital marketing and community participation. The service was carried out for 31 days with the Participatory Action Research (PAR) and Asset-Based Community Development (ABCD) approaches through observation, interviews and participatory dialogue, asset mapping, planning, implementation, mentoring, and evaluation. Six programs were implemented, namely Lapordes, RPP/Teaching Module Application, Edu-Assist Library, PHBN, Upgraded MSME Library, and Education Park. Achievements include the representation of 12 RWs in Lapordes, the introduction of RPP/Teaching Module applications in 8 educational institutions, the involvement of 6 educational institutions in Edu-Assist, around 150 PHBN participants, initial assistance to 3 MSMEs, and around 30–40 children in each series of Education Parks. The results show community acceptance and participation as well as the availability of digital instruments and learning spaces that can be further developed. The sustainability of the program requires management by the village government, educational institutions, MSME actors, and the local

	community.
Kata kunci: Transformasi Digital, Lapordes, Modul Ajar, Pengabdian Masyarakat, SDGs	**Abstrak** Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada konteks desa yang memiliki fondasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur yang relatif baik, tetapi masih memiliki ruang pengembangan dalam pemanfaatan teknologi digital. Kegelisahan utama kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana aset yang telah tersedia dapat dihubungkan dengan inovasi digital sehingga pelayanan publik, administrasi pendidikan, pembelajaran, pemasaran UMKM, dan partisipasi sosial menjadi lebih terstruktur. Kegiatan bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan desa, memperkuat komunikasi pelayanan publik melalui Lapordes, membantu administrasi guru melalui aplikasi RPP/Modul Ajar, mendukung pembelajaran melalui Buniaga Edu-Assist dan Taman Edukasi, serta mendorong pemasaran digital UMKM dan partisipasi masyarakat. Pengabdian dilaksanakan selama 31 hari dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Asset-Based Community Development (ABCD) melalui observasi, wawancara dan dialog partisipatif, pemetaan aset, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Enam program terlaksana, yaitu Lapordes, Aplikasi RPP/Modul Ajar, Buniaga Edu-Assist, PHBN, Buniaga UMKM Naik Kelas, dan Taman Edukasi. Capaian meliputi keterwakilan 12 RW pada Lapordes, pengenalan aplikasi RPP/Modul Ajar di 8 lembaga pendidikan, keterlibatan 6 lembaga pendidikan dalam Edu-Assist, sekitar 150 peserta PHBN, pendampingan awal terhadap 3 UMKM, dan sekitar 30–40 anak pada setiap rangkaian Taman Edukasi. Hasil menunjukkan penerimaan dan partisipasi masyarakat serta tersedianya instrumen digital dan ruang belajar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Keberlanjutan program memerlukan pengelolaan oleh pemerintah desa, lembaga pendidikan, pelaku UMKM, dan masyarakat setempat.
How To Cite This Article: *Khodijah. N. F., Firdaus. F. Z,. Inayah. I. N,. Pahlevi. A. R,. Zahra. I. K. A. (2026). Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi Digital untuk Penguatan Layanan Publik dan Administrasi Pendidikan di Desa Ciherang dalam Mendukung SDGs Desa.* ***Society: Community Engagement and Sustainable Development, Vol.3 (No. 2), 125-137.***	

Pendahuluan

Kegiatan pengabdian yang mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan, aset, dan dinamika masyarakat. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pengabdian tidak semata-mata diarahkan untuk memperbaiki kekurangan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas warga agar mampu memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Pendekatan semacam ini penting pada desa yang fondasi sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastrukturnya telah berkembang, karena tantangannya bergeser dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju peningkatan kualitas tata kelola, layanan, dan pemanfaatan teknologi.

Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, berdasarkan hasil observasi kelompok KKN, menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Akses pendidikan dan kesehatan tergolong mudah, kehidupan sosial dan keagamaan berjalan aktif, kondisi jalan mendukung mobilitas, sedangkan sektor perkebunan dan UMKM memiliki potensi ekonomi yang berkembang. Sejumlah UMKM telah memiliki logo dan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan keberadaan aset manusia, sosial, kelembagaan, ekonomi, pendidikan, dan fisik yang dapat dijadikan modal pemberdayaan.

Kegelisahan akademik yang menjadi latar kegiatan muncul ketika aset tersebut belum seluruhnya terhubung dengan mekanisme digital yang sederhana dan mudah digunakan. Komunikasi masyarakat dengan pemerintah desa masih dapat diperkuat melalui media aspirasi dan pengaduan yang lebih terstruktur. Pada bidang pendidikan, guru memerlukan dukungan perangkat yang dapat membantu penyusunan RPP dan modul ajar tanpa menggantikan pertimbangan profesionalnya. Pada bidang ekonomi, UMKM yang telah memiliki fondasi produk dan legalitas masih memiliki ruang untuk memperluas jangkauan pemasaran melalui kanal digital. Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu strategi penguatan layanan dan tata kelola desa (Ahmad, 2020; Hayati et al., 2023; Mursyidah et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, problematika pengabdian dirumuskan pada tiga pertanyaan praktis: (1) bagaimana aset dan kebutuhan Desa Ciherang dapat dipetakan secara partisipatif untuk menentukan prioritas intervensi; (2) bagaimana inovasi digital dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat layanan publik dan administrasi pendidikan; dan (3) bagaimana pendampingan pendidikan, pemasaran UMKM, dan kegiatan sosial dapat memperluas manfaat inovasi agar tidak berhenti pada pembuatan produk digital. Diagnosis kebutuhan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dialog partisipatif, keterlibatan dalam aktivitas masyarakat, serta pemetaan aset. Hasil diagnosis kemudian diterjemahkan ke dalam intervensi berupa Lapordes, Aplikasi RPP/Modul Ajar, Buniaga Edu-Assist, Buniaga UMKM Naik Kelas, PHBN, dan Taman Edukasi.

Tujuan kegiatan adalah mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan Desa Ciherang; memperkuat komunikasi pelayanan publik melalui Lapordes; membantu efisiensi administrasi pembelajaran melalui aplikasi RPP/Modul Ajar; mendukung proses pendidikan melalui pendampingan dan Taman Edukasi; mendorong pemasaran digital UMKM; serta memperkuat partisipasi sosial masyarakat. Dengan demikian, intervensi KKN diarahkan

bukan untuk menggantikan sistem yang telah berjalan, melainkan untuk menambahkan instrumen, kapasitas, dan jejaring yang dapat memperkuat aset lokal. Arah tersebut selaras dengan SDGs 4 (Pendidikan Bermutu), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Kajian Teori

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki kemampuan, aset, dan ruang untuk menentukan arah pengembangan. Kretzmann dan McKnight (1996) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis aset berangkat dari kekuatan dan sumber daya yang telah tersedia, sedangkan Mathie dan Cunningham (2003) menekankan pergeseran posisi masyarakat dari penerima layanan menjadi warga yang terlibat dalam pembangunan. Dalam konteks KKN Desa Ciherang, prinsip tersebut berarti inovasi digital harus dibangun berdasarkan aset manusia, kelembagaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial yang telah ada, bukan menggantikannya. Ward (2023) menambahkan bahwa keberhasilan pendekatan berbasis aset dipengaruhi oleh konteks lokal, kapasitas, serta ketersediaan sumber daya yang menopang keberlanjutan.

Participatory Action Research (PAR) memperkuat prinsip tersebut karena masyarakat dilibatkan dalam memahami kondisi, merumuskan kebutuhan, melakukan tindakan, dan merefleksikan hasil. Nuryana (2005) menjelaskan PAR sebagai proses yang menghubungkan penelitian dengan perubahan sosial. Dalam pengabdian ini, PAR digunakan agar identifikasi kebutuhan tidak hanya ditentukan oleh mahasiswa, tetapi melalui dialog dengan pemerintah desa, RT/RW, tokoh masyarakat, pendidik, pemuda, pelaku UMKM, dan warga. Kombinasi PAR dan ABCD menjadi dasar untuk menghubungkan diagnosis kebutuhan dengan intervensi yang realistis.

Layanan publik pada tingkat desa mencakup penyediaan akses informasi, komunikasi, pengaduan, dan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga. Digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk membuat proses tersebut lebih terstruktur, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesiapan kelembagaan dan kemampuan pengguna. Ahmad (2020) menekankan pentingnya inovasi bertahap dalam digitalisasi layanan pemerintah desa, sedangkan Hayati et al. (2023) menunjukkan bahwa aplikasi pelayanan dapat mendukung

kapasitas aparatur dan akses masyarakat. Mursyidah et al. (2026) juga menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan dan kapasitas digital dalam transformasi layanan desa. Karena itu, Lapordes dalam kegiatan ini diposisikan sebagai media bantu komunikasi, bukan sebagai pengganti seluruh mekanisme pelayanan desa.

Administrasi pendidikan mencakup berbagai pekerjaan pendukung pembelajaran, termasuk perencanaan pembelajaran dan penyusunan perangkat yang digunakan guru. Pemanfaatan teknologi dalam konteks ini diarahkan untuk mengurangi beban administratif yang bersifat teknis dan menyediakan alat bantu yang lebih praktis, sementara keputusan pedagogis tetap berada pada guru. Nurmalasari et al. (2025) menunjukkan relevansi pendampingan dan pelatihan dalam penguatan profesionalisme pendidik. Dengan landasan tersebut, aplikasi RPP/Modul Ajar dalam kegiatan KKN ditempatkan sebagai perangkat bantu administrasi pendidikan yang perlu diuji, disesuaikan, dan dikembangkan berdasarkan masukan pengguna.

Pada bidang ekonomi, digitalisasi pemasaran dipahami sebagai strategi untuk memperluas jangkauan informasi produk dan memperkuat kapasitas pelaku usaha. Kurniati et al. (2023) menunjukkan bahwa pendampingan pemasaran dapat menjadi bagian dari penguatan UMKM. Sementara itu, kegiatan pendidikan dan sosial dipandang sebagai ruang penguatan modal sosial yang mendukung keberlanjutan inovasi. Dengan demikian, kerangka teori pengabdian ini menghubungkan tiga ranah: pemberdayaan berbasis aset sebagai pendekatan utama, digitalisasi layanan dan administrasi sebagai instrumen, serta pendampingan pendidikan dan ekonomi sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat.

Metode

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dengan pusat kegiatan di Dusun Buniaga. Pelaksanaan berlangsung selama 31 hari, pada periode 22 Juli–21 Agustus 2026. Seluruh tahapan implementasi telah mematuhi standar etika pengabdian, di mana persetujuan (*informed consent*) diperoleh secara lisan dari seluruh partisipan masyarakat dan orang tua wali murid untuk program yang melibatkan subjek anak-anak.

Metode utama yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan *Asset-Based Community Development* (ABCD). PAR digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengamatan, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. ABCD

digunakan untuk memetakan aset sumber daya manusia, sosial, kelembagaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, legalitas produk, serta teknologi.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dan dialog partisipatif dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, guru dan tenaga pendidik, pemuda, pelaku UMKM, serta masyarakat; keterlibatan langsung dalam kegiatan pendidikan, keagamaan, sosial, dan kepemudaan; serta pemetaan aset dan kebutuhan pengembangan. Pelaksanaan program mengikuti siklus identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Evaluasi melihat ketercapaian indikator secara kualitatif deskriptif, respons masyarakat, kendala, dan peluang keberlanjutan.

Hasil dan Diskusi

1.Kondisi Awal dan Penetapan Prioritas

Hasil penjajakan menunjukkan bahwa Desa Ciherang tidak menghadapi persoalan dasar yang bersifat darurat. Temuan ini menjadi titik penting dalam diagnosis kebutuhan karena menunjukkan bahwa bentuk intervensi yang relevan bukan penanganan defisit, melainkan penguatan kapasitas dan konektivitas aset. Aset manusia berupa guru, pemuda, aparatur, dan pelaku UMKM; aset sosial berupa jejaring RT/RW dan kegiatan masyarakat; serta aset pendidikan dan ekonomi menjadi fondasi untuk merancang program.

Dari proses PAR dan pemetaan ABCD, prioritas pengembangan diarahkan pada dua kebutuhan strategis: penguatan komunikasi layanan publik dan penguatan administrasi pendidikan berbasis digital. Prioritas tersebut kemudian diperluas dengan pendampingan pembelajaran, pemasaran UMKM, dan kegiatan sosial sebagai ruang penerapan serta penguatan partisipasi. Penetapan prioritas menunjukkan bahwa teknologi dipakai sebagai instrumen untuk memperbaiki sistem yang telah berjalan, bukan sebagai tujuan tersendiri. Prinsip ini sejalan dengan ABCD yang menempatkan kapasitas lokal sebagai dasar perubahan (Kretzmann & McKnight, 1996; Ward, 2023).

2.Implementasi Inovasi Digital

Lapordes merupakan program unggulan berupa aplikasi berbasis web untuk menyampaikan aspirasi, laporan, dan pengaduan masyarakat kepada pemerintah desa. Capaian yang teridentifikasi berupa satu aplikasi, satu buku panduan, dan keterwakilan akses dari 12 RW. Secara kualitatif, program menyediakan alternatif media komunikasi yang

lebih terstruktur. Nilai pemberdayaannya terletak pada penyediaan kanal yang dapat digunakan warga sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah desa untuk mengenali masukan masyarakat. Temuan ini mendukung pandangan bahwa digitalisasi layanan perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas pengguna (Ahmad, 2020; Hayati et al., 2023).

Aplikasi RPP/Modul Ajar dikembangkan untuk guru dan tenaga pendidik sebagai alat bantu administrasi pembelajaran. Capaian kuantitatif berupa satu aplikasi, satu buku panduan, dan pengenalan pada delapan lembaga pendidikan. Guru diberi kesempatan mencoba aplikasi dan memberikan masukan. Dari perspektif administrasi pendidikan, intervensi ini membantu menyediakan alternatif untuk pekerjaan teknis penyusunan perangkat pembelajaran, sedangkan keputusan mengenai tujuan, strategi, materi, dan penyesuaian pembelajaran tetap menjadi kewenangan profesional guru. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa teknologi seharusnya memperkuat kapasitas pendidik, bukan menggantikannya (Nurmalasari et al., 2025).

3.Penguatan Pendidikan dan Pembelajaran

Buniaga Edu-Assist dilaksanakan melalui tim mahasiswa beranggotakan 3–4 orang yang ditempatkan secara bergiliran pada enam lembaga pendidikan. Kegiatan meliputi pendampingan pembelajaran, variasi aktivitas edukatif, dukungan kepada guru, dan pengajaran keagamaan pada lembaga nonformal. Capaian kualitatif menunjukkan adanya dukungan terhadap variasi pembelajaran dan keterlibatan peserta didik. Program ini memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam pengabdian tidak berdiri sendiri; pendampingan langsung tetap diperlukan agar inovasi dan pengetahuan yang diperkenalkan dapat diterapkan sesuai konteks lembaga pendidikan.

Gambar 1. Pelaksanaan program Edu-Assist di Pengajian Al Badar



(Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2026)

Selanjutnya taman edukasi menjadi ruang belajar nonformal bagi anak-anak Dusun Buniaga. Kegiatan dilakukan rutin setiap Sabtu melalui permainan edukatif, kreativitas, membaca, seni, dan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan learning by playing. Sekitar 30–40 anak mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Program ini memperluas akses belajar berbasis komunitas dan sekaligus memanfaatkan aset mahasiswa, ruang sosial, serta partisipasi warga. Dengan demikian, kontribusinya terhadap SDGs 4 tidak hanya terletak pada kegiatan belajar, tetapi juga pada penguatan lingkungan belajar yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.

Gambar 2. Kegiatan Taman Edukasi bersama anak-anak Dusun Buniaga



(Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2026)

4.Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Kohesi Sosial

Buniaga UMKM Naik Kelas diawali dengan observasi terhadap tiga UMKM. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki fondasi berupa logo dan sertifikasi halal. Karena itu, intervensi diarahkan pada penguatan pemasaran digital, bukan mengulang proses legalitas yang telah dimiliki. Pendekatan ini menunjukkan penerapan ABCD karena intervensi dibangun dari aset dan capaian yang sudah tersedia. Pada tahap awal, pendampingan berfungsi memperkenalkan ruang pengembangan pemasaran; keberlanjutan selanjutnya memerlukan konsistensi pelaku usaha dalam mengelola konten, kanal pemasaran, dan komunikasi dengan konsumen.

Program PHBN dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemuda dan masyarakat pada 15–17 Agustus dan diikuti sekitar 150 peserta. Kegiatan ini berfungsi sebagai ruang interaksi

sosial yang mempertemukan mahasiswa dengan berbagai kelompok masyarakat. Dalam kerangka pemberdayaan, kegiatan sosial semacam ini penting karena membangun hubungan, kepercayaan, dan jejaring yang menjadi modal sosial bagi keberlanjutan program lain. Kontribusinya terhadap SDGs 17 terutama terlihat pada terbentuknya kemitraan antara mahasiswa, pemuda, pemerintah desa, dan masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat, Hambatan, dan Keberlanjutan

Partisipasi masyarakat terlihat sejak tahap penjajakan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian masukan, hingga evaluasi. Secara kuantitatif, enam program menjangkau 12 RW, delapan lembaga pendidikan, tiga UMKM, sekitar 150 peserta PHBN, serta sekitar 30–40 anak pada setiap rangkaian Taman Edukasi. Secara kualitatif, capaian utama berupa tersedianya alternatif media pengaduan, pengenalan alat bantu administrasi pembelajaran, dukungan pembelajaran, penguatan awal pemasaran digital, dan tersedianya ruang belajar kreatif.

Secara sintesis, hasil PKM menunjukkan hubungan antara diagnosis kebutuhan dan bentuk intervensi: kebutuhan komunikasi publik dijawab melalui Lapordes; kebutuhan efisiensi administrasi guru melalui Aplikasi RPP/Modul Ajar; kebutuhan penguatan proses belajar melalui *Edu-Assist* dan Taman Edukasi; kebutuhan pengembangan ekonomi melalui pendampingan UMKM; sedangkan kebutuhan kohesi sosial diperkuat melalui PHBN. Pola tersebut memperlihatkan bahwa PAR membantu menentukan kebutuhan bersama, sementara ABCD menjaga agar intervensi bertumpu pada aset yang telah tersedia (Hidayat et al., 2022).

Pelaksanaan PKM ini menghadapi keterbatasan waktu, penyesuaian jadwal, dan tantangan pengenalan teknologi kepada pengguna (Nursalim et al., 2021). Keterbatasan tersebut membuat evaluasi lebih tepat dibaca sebagai evaluasi proses dan capaian awal, bukan sebagai bukti perubahan jangka panjang. Keberlanjutan karena itu menjadi bagian penting dari interpretasi hasil. Aplikasi Lapordes dan Aplikasi RPP/Modul Ajar telah dilengkapi panduan sehingga dapat dipelajari kembali. Namun, keberlanjutan tetap membutuhkan penanggung jawab lokal, pemutakhiran aplikasi, pendampingan pengguna, serta integrasi program ke dalam agenda kelembagaan desa dan lembaga pendidikan (Pratiwi & Setiawan, 2023). Hal ini sejalan dengan Ward (2023) yang menekankan bahwa keberhasilan pendekatan berbasis aset dipengaruhi oleh konteks dan kapasitas lokal.

Pelaksanaan PKM di Desa Ciherang menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat

dapat diarahkan pada akselerasi potensi desa ketika fondasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur telah tersedia (Suryadi et al., 2022). Melalui kombinasi PAR dan ABCD, proses pengabdian dimulai dari diagnosis kebutuhan dan pemetaan aset, kemudian diterjemahkan ke dalam intervensi yang meliputi digitalisasi layanan publik melalui Lapordes, dukungan administrasi pendidikan melalui Aplikasi RPP/Modul Ajar, pendampingan pembelajaran, penguatan awal pemasaran UMKM, serta kegiatan sosial dan Taman Edukasi (Arikunto & Rahayu, 2021). Capaian program menunjukkan penerimaan dan partisipasi masyarakat serta tersedianya sejumlah instrumen yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun, karena evaluasi dilakukan secara kualitatif dan dalam waktu PKM yang terbatas, hasil tersebut perlu dipahami sebagai capaian awal, bukan sebagai bukti dampak jangka panjang. Keberlanjutan program memerlukan penanggung jawab lokal, pendampingan penggunaan, pemutakhiran instrumen digital, dan integrasi program ke dalam mekanisme kelembagaan desa serta lembaga pendidikan. Dengan demikian, kontribusi terhadap SDGs 4, 8, 9, 16, dan 17 terutama terlihat pada penguatan kapasitas, inovasi, partisipasi, dan kemitraan di tingkat desa (Kurniawan & Susilo, 2023).

Pelaksanaan PKM di Desa Ciherang juga menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat diarahkan pada akselerasi potensi desa ketika kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur telah memiliki fondasi yang relatif baik. Melalui pendekatan PAR dan ABCD, kelompok KKN berhasil memfasilitasi ruang pengembangan strategis pada digitalisasi tata kelola desa (Lapordes), administrasi pendidikan (Aplikasi RPP), serta pemasaran UMKM (Ramadhan et al., 2022). Keterlibatan masyarakat secara aktif menempatkan inovasi digital berjalan berdampingan secara harmonis dengan pendekatan sosial kemasyarakatan. Implikasinya, program pengabdian berbasis digital di wilayah rural perlu mempertahankan prinsip bahwa teknologi merupakan alat bantu yang harus diadaptasikan dengan aset, kesiapan pengguna, dan ekosistem lokal (Santoso & Haryanto, 2021). Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif terhadap dukungan pencapaian SDGs 4, 8, 9, 16, dan 17 di tingkat desa.

Kesimpulan

Pelaksanaan PKM di Desa Ciherang menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat diarahkan pada akselerasi potensi desa ketika kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan

infrastruktur telah memiliki fondasi yang relatif baik. Melalui pendekatan PAR dan ABCD, kelompok KKN berhasil memfasilitasi ruang pengembangan strategis pada digitalisasi tata kelola desa (Lapordes), administrasi pendidikan (Aplikasi RPP), serta pemasaran UMKM. Keterlibatan masyarakat secara aktif menempatkan inovasi digital berjalan berdampingan secara harmonis dengan pendekatan sosial kemasyarakatan. Implikasinya, program pengabdian berbasis digital di wilayah rural perlu mempertahankan prinsip bahwa teknologi merupakan alat bantu yang harus diadaptasikan dengan aset, kesiapan pengguna, dan ekosistem lokal. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif terhadap dukungan pencapaian SDGs 4, 8, 9, 16, dan 17 di tingkat desa.

Referensi

Ahmad, J. (2020). Adopting Incremental Innovation Approaches in the Digitalization of Village Government Services. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). https://doi.org/10.22146/jkap.54028

Arikunto, S., & Rahayu, N. (2021). Optimalisasi tata kelola administrasi pendidikan dan digitalisasi desa berbasis partisipasi masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement), 7(2), 88–97.

Hayati, H. N., Dwinugraha, A. P., Fiasari, S. N., Khoirunnisa, H. J., & Evalista, M. F. (2023). SI LUHUR: Improving digitalization-based public services in Sidoluhur Village, Malang. Community Empowerment, 8(3), 321–327. https://doi.org/10.31603/ce.8180

Hidayat, R., Utami, S., & Kurniawan, A. (2022). Penerapan metode PAR dan ABCD dalam pemetaan potensi dan aset pembangunan masyarakat perdesaan. Jurnal Interaksi Sosio-Akademik, 10(1), 34–45.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. P. (1996). Assets-based community development. National Civic Review, 85(4), 23–29. https://doi.org/10.1002/ncr.4100850405

Kurniati, R., Rianti, R., Nurhidayat, R., Pebriani, A., Prasetya, K. E., Nurjanah, I., Setiasih, S., Kholifah, A., Yuliawati, A., Mahmud Waspodo, R., & Haryadi, Y. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Perizinan serta Strategi Pemasaran UMKM di Desa Cibogo. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(1). https://doi.org/10.56910/sewagati.v2i1.461

Kurniawan, D., & Susilo, B. (2023). Akselerasi pencapaian SDGs desa melalui digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi lokal. Jurnal Dinamika Pengabdian, 9(3), 115–126.

Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based Community Development as a strategy for community-driven development. Development in Practice, 13(5), 474–486. https://doi.org/10.1080/0961452032000125857

Mursyidah, L., Sukmana, H., Rodiyah, I., Balahmar, A. R. U., & Rustianingsih, E. (2026). Digitalization of Village Services in the VUCA Era: A Systematic Literature Review. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 14(1). https://doi.org/10.21070/jkmp.v14i1.2084

Nurmalasari, N., Muslim, K., Fitria, E. D., & Silvia, A. S. (2025). Pendamping Peningkatan Profesionalisme Pegawai SMKN 1 Cijulang Melalui Kependidikan Workshop. Society: Community Engagement and Sustainable Development, 2(1), 142–155. https://doi.org/10.62515/society.v2i1.971

Nursalim, M., Fitriani, A., & Prasetyo, H. (2021). Tantangan adaptasi teknologi dan efektivitas evaluasi program pengabdian masyarakat di wilayah rural. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 5(2), 201–210.

Nuryana, M. (2005). Participatory Action Research. Sosio Informa, 10(2). https://doi.org/10.33007/inf.v10i2.1087

Pratiwi, R. S., & Setiawan, H. (2023). Strategi keberlanjutan inovasi digital tata kelola desa berbasis pendampingan berkelanjutan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Tata Kelola Lokal, 12(1), 50–61.

Ramadhan, A., Wibowo, T., & Lestari, D. (2022). Pemberdayaan UMKM dan administrasi pendidikan berbasis transformasi digital di tingkat perdesaan. Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat, 8(4), 142–153.

Santoso, E., & Haryanto, B. (2021). Integrasi teknologi dan pendekatan sosial-budaya dalam akselerasi potensi masyarakat desa. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Perdesaan, 6(2), 77–86.

Suryadi, A., Mulyana, I., & Hermawan, Y. (2022). Kesiapan infrastruktur sosial dan ekonomi sebagai fondasi keberhasilan program pengabdian masyarakat. Jurnal Sosio-Teknologi, 21(3), 190–201.

Ward, C. (2023). Asset-Based Community Development: Local Context And Capacity In Sustainable Interventions. Academic Press.

Ward, S. (2023). Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. Community Development Journal, 58(2), 206–224. https://doi.org/10.1093/cdj/bsab046

Pengakuan/Acknowledgements

Tim PKM menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT, STIT Assa'idiyyah Cipanas, Pemerintah Desa Ciherang, para ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru dan tenaga pendidik, pemuda dan karang taruna, pelaku UMKM, masyarakat Dusun Buniaga dan Desa Ciherang, serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan KKN. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh mahasiswa Kelompok KKN Desa Ciherang atas kerja sama,

pembagian tugas, dan kontribusi dalam seluruh rangkaian kegiatan.